

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
LPPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN		CAPAIAN KINERJA	OPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI	... orang	x 100 %	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019
			Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	327 orang					
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS	... orang	x 100 %	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019
			Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	306 orang					
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA	... orang	x 100 %	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	384 orang								
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK	... orang	x 100 %	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019		
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th	296.919 orang							
5	Tingkat Partisipasi Warga Negara Perempuan Usia 16 – 18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	Jumlah Siswa Perempuan Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK	... orang	x 100 %	... %	Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBPS	Data bersumber dari Profil Pendidikan dan profil Kependudukan Tahun 2019		
	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 -18 Tahun	296.919 orang							
12	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	87	Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman	Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman	3.757.332 orang	x 100 %	67,67%	Dinas PPKBPS	
			Jumlah penduduk	5.551.758 orang					
		88	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 - 18 tahun	Jumlah anak (0-18 tahun) yang sudah memiliki akta kelahiran	1.637.660 orang	x 100 %	88,83%	Dinas PPKBPS	
			Jumlah anak 0-18 tahun	1.843.505 orang					
		93	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	569.254 orang	x 100 %	70,44%	Dinas PPKBPS	
			Jumlah Pasangan Usia Subur	808.029 orang					
		94	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	107.614 orang	x 100 %	13,31%	Dinas PPKBPS	
			Jumlah Pasangan Usia Subur	808.029 orang					

Padang, 4 Februari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MMPembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	OPD Penanggungjawab
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1 Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB Jumlah kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih	...Kab/kota % ...Kab/kota	Dinas PMPTSP
		Peraturan ttg Ketertiban Umum	2 Kab/kota memiliki perda tentang ketertiban umum	Jumlah kab/kota memiliki perda Ketertiban Umum dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100%	Jumlah kab/kota memiliki perda Ketertiban Umum Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD	...Kab/kota %	Dinas Satpol PP
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2019 Penduduk pada akhir tahun 2019	orang 5.551.758 Jiwa	% %
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	4 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Tanggal Penyampaian LPPD 2019 (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian	Biro Pemerintahan
			5 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun) Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2019 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Tgl penyampaian Tgl penyampaian	Badan Keuangan Daerah Biro Organisasi
		Implementasi SPM	6 Pemerintah Daerah yang memiliki Produk Hukum Daerah tentang SPM	Total Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Perda/Perkada tentang Penerapan SPM x 100%, Rata-rata=... urusan=... Kab/Kota	1. Kab/Kota = ada atau tidak	... Kab/kota	Biro Pemerintahan
					2. Kab/Kota = ada atau tidak		
					3. Kab/Kota = ada atau tidak		
					4. Kab/Kota = ada atau tidak		
		5. Kab/Kota = ada atau tidak	Dst..				
Jumlah = ada atau tidak							
Hubungan antar daerah	7 Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU Pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2019)	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah	Biro Adm Pembangunan, Kerjasama dan Rantau		
			1. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2019	No&tgl MOU			
			2. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2019MoU			
			3. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2019MoU			
4. No dan tgl MOU yang berlaku s.d tahun 2019MoU						
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8 Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas 1 pembangunan nasional	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 5 program prioritas	Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan	Bappeda
		Kewenangan	9 Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2018) X 100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/Kota dibagi jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100% Rata-rata=... urusan=... Kab/kota	1. Kab/kota = urusan 2. Kab/kota = urusan 3. Dst... Jumlah = ... urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD sebanyak... Kab/Kota Kab/kota	Biro Pemerintahan
		Keuangan	10 Waktu penetapan Perda APBD tahun 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019 (31 Desember 2019)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD tahun 2019	tgl penetapan	Badan Keuangan Daerah

No	ASPEK	FOKUS	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)	Capaian Kinerja	OPD Penanggungjawab	
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Keuangan	11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : --- Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Badan Keuangan Daerah
			12	belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019	Rp	Badan Keuangan Daerah
						1. Urusan Pendidikan	Rp	
						2. Urusan Kesehatan	Rp	
						3. Urusan PU dan Penataan Ruang	Rp	
						4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	
						5. Urusan Sosial	Rp	
			6. Urusan Trantibum dan Linmas	Rp				
			Total Belanja APBD	Rp				
		13	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100%	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan	Rp	Badan Keuangan Daerah	
					1. Urusan Pendidikan	Rp		
					2. Urusan Kesehatan	Rp		
			Pelayanan publik	14	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik	Ada/tidak
	Kepegawaian	15	Rasio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi Jumlah Penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2019	orang	% BKD dan Dinas PPKBPS	
				Penduduk pada akhir tahun 2019	5.551.758 Jiwa			
		16	Persentase PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	orang	% BKD	
					Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	orang		
	Kelembagaan	17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Pembentukan OPD berdasarkan PP 18/2016	Jumlah OPD	Unit	Biro Organisasi	
1. Biro (setda)					Unit			
2. Dinas					Unit			
3. Badan					Unit			
4. Kantor					Unit			
5. Rumah Sakit					Unit			
6. Lembaga Teknis lainnya					Unit			
7. Kabupaten/kota	Unit							

Padang, 4 Februari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198902 1 001

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI

LAMPIRAN I.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM (DATA ISIAN SELURUH OPD)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Yang Dilaksanakan :

1. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lampiran I.2 (OPD Yang Melaksanakan lebih dari satu urusan)

No	ASPEK	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2019)		Capaian Kinerja				Keterangan
					Urusan Adminduk Capil	Urusan PPKB	Urusan Adminduk Capil	Urusan PPKB	7 (A)	7(B)	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1, Program Pelayanan Administrasi Kependudukan; Anggaran : Rp.7.370.134.597,- dengan Realisasi Rp.7.211.258.528,-	1. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja; 2. Program Keluarga Berencana; 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 4. Program Peningkatan Pengendalian Penduduk; Anggaran : Rp.1.376.884.134,- dengan Realisasi : Rp.1.284.191.168,-	program	1 program	program	4 program	Berdasarkan Renstra dan DPA 2019
2		Keberadaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak 16 yang terdiri dari: SOP #1 Layanan Data dan Informasi Kependudukan SOP #2 Pemberian Hak Akses Database Kependudukan SOP #3 Pemberian Hak Akses Aplikasi SIAK	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak 3 yang terdiri dari: SOP #1 Promosi dan Temu Karya Program Keluarga Nasional SOP #2 Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi bagi Remaja SOP #3 Penilaian KB KS	Jenis SOP	17 buah	Jenis SOP	3 buah	Yang berlaku s.d. tahun 2019	
3		KETAATAN THD PERATURAN / UU	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada, sebutkan:	Perda 0	tidak ada	Perda 0	tidak ada		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang ada	Jumlah jabatan yang ada	8 Jabatan	100,00%	12 Jabatan	92,30%	Kadaan 31 Desember 2019
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. Jabatan Fungsional #3 4. Jabatan Fungsional #4	Jumlah jabatan yang harus ada Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi OPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. Jabatan Fungsional #3 4. Jabatan Fungsional #4	8 Jabatan Jabatan		13 Jabatan Jabatan		Kadaan 31 Desember 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD Jumlah PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD Jumlah PNS Provinsi	15 orang BKD	%	33 orang BKD	%	Kadaan 31 Desember 2019
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat OPD yang ada	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat OPD yang ada	2 orang 8 orang	25%	5 orang 13 orang	38,46%	Kadaan 31 Desember 2019
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan Jumlah pejabat OPD yang ada	Jumlah pejabat OPD yang memenuhi persyaratan kepengangkatan Jumlah pejabat OPD yang ada	8 orang 8 orang	100%	12 orang 12 orang	100%	Kadaan 31 Desember 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di OPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	Jumlah dokumen perencanaan yang ada	3 dokumen		3 dokumen		Tahun 2019
		-RENSTRA-OPD		-RENSTRA-OPD	ada	ada					
		-RENJA-OPD		-RENJA-OPD	ada	ada					
		-RKA-OPD		-RKA-OPD	ada	ada					
10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD x 100%	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja OPD Jumlah program RENJA OPD	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja OPD Jumlah program RENJA OPD	1 program 1 program	100%		4 program 4 program	100%		
11	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD Jumlah Program dalam RKA OPD	Jumlah program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD Jumlah Program dalam RKA OPD	1 program 1 program	100%		4 program 4 program	100%		
12	Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD Jumlah program dalam DPA OPD	Jumlah program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD Jumlah program dalam DPA OPD	1 program 1 program	100%		4 program 4 program	100%		

6	LAPORAN KEUANGAN OPD	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran OPD	Total anggaran OPD	Rp3.081.866.150	0,043%	Rp1.376.884.134	0,019%	
					Total belanja APBD (anggaran)	Total belanja APBD (anggaran)	Rp7.086.787.748.692				Rp7.086.787.748.692
		14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Langsung OPD	Realisasi Belanja Langsung OPD	Rp3.030.427.671	27%	Rp4.694.686.831	42%	
					Total Realisasi Belanja OPD	Total Realisasi Belanja OPD	Rp11.082.791.756				Rp11.082.791.756
		15	Total Belanja langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Total Belanja Pemeliharaan OPD	Total Belanja Pemeliharaan OPD	Rp1.333.523.841	22%	Rp1.333.523.841	22%	
			Total Belanja Barang dan Jasa OPD	Total Belanja Barang dan Jasa OPD	Rp5.856.357.255		Rp5.856.357.255				
16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja OPD	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja OPD x 100%	Realisasi belanja tidak langsung OPD	Realisasi belanja tidak langsung OPD	Rp4.073.541.759	36%	Rp4.073.541.759	36%			
			Total Belanja OPD	Total Belanja OPD	Rp11.082.791.756				Rp11.082.791.756		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, Calk)	ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)	Jumlah komponen laporan keuangan	Jumlah komponen laporan keuangan	komponen	3 Dokumen	komponen	3 Dokumen	
					- Neraca	- Neraca	ada		ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	18	Adanya inventarisasi barang / aset OPD	ada atau tidak ada inventarisasi barang aset OPD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset OPD 5 tahun terakhir	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/aset OPD 5 tahun terakhir	ada		ada		BA Sensus Aset
		19	Jumlah aset yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD x 100%	Jumlah aset yang tidak digunakan OPD	Jumlah aset yang tidak digunakan OPD	Rp30.195.000	0,28%	Rp30.195.000	0,28%	Yang dimaksud adalah aset yang berfungsi baik namun tidak digunakan
				Total Asset yang dikuasai OPD	Total Asset yang dikuasai OPD	Rp10.477.921.664			Rp10.477.921.664		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	Jumlah fasilitas/prasarana informasi	buah	4 Buah	buah	4 Buah	
			1. Papan Pengumuman		1. Papan Pengumuman	1. Papan Pengumuman	ada		ada		
			2. Pos Pengaduan		2. Pos Pengaduan	2. Pos Pengaduan	ada		ada		
			3. Leaflet		3. Leaflet	3. Leaflet	ada		ada		
			4. Mobil keliling		4. Mobil keliling	4. Mobil keliling	tidak ada		tidak ada		
5. Pengumuman di media massa		5. Pengumuman di media massa	5. Pengumuman di media massa	ada		ada					
21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	tidak ada		tidak ada		Survey yang dilaksanakan tahun 2019	

Padang, 4 Februari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001